University of Islam Malang
REPOSITORY

EVALUASI KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATU TAHUN 2010-2030

(Studi Pada Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Administrasi Publik Universitas Islam Malang

Oleh

MAZIYATUN NAFIAH

NPM 21801091038

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2022

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

RINGKASAN

Maziyatun Nafiah, 2022, NPM 21801091038, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 (Studi Pada Kota Batu). Dosen Pembimbing I: DR. Nurul Umi Ati, M.AP, Dosen Pembimbing II: Suyeno,S.Sos., M.AP

Fenomena alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, tempat wisata, hotel ataupun pembangunan lain guna menunjang kehidupan masyarakat Kota Batu terus mengalami peningkatan yang siginifikan. Terlepas dari peningkatan tersebut, masih dijumpai pembangunan yangbelum memperhatikan akan tata ruang wilayah. Hal ini diketahui dengan terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan serta berkurangnya RTH Publik Kota Batu.Berangkat dari hal ini mendorong untuk dilakukannya evaluasi kebijakan pemerintah Kota Batu yang didasarkan pada Perda Kota Batu No 7 tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 agar implementasi penataan ruang di Kota Batu dapat lebih terarah sebagaimana peruntukannya guna menunjang perkembangan Kota Batu ke depannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui,mengevaluasi serta menganalisis kebijakan rencana tata ruang wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 yang sesuai dengan peruntukannya, serta mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di Kota Batu.Dalam rangka mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitiankualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada analisanya peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan dengan model CIPP (*context, input, process,* dan *product)* oleh Stufflebeam (2014) mengenai evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan, evaluasi terhadap proses dan evaluasi terhadap dampak/ hasil. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *data collection, data condensation, data display, dan conclusion* sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (2014: 12-14). Peneliti menggunakan triagulasi sumber dan triagulasi teknik guna memastikan keabsahan data penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Berdasarkan tahapan evaluasi konteks, input, proses dan produk, penerapan kebijakan penataan ruang di Kota Batu masih terdapat ketidaksesuaikan.Namun, mengenai peningkatan RTH Publik telah dilakukan sebagaimana arahan dari kebijakan penataan ruang.(2)beberapa kendala yang dihadapi dalam penataan ruang di Kota Batu diantaranya yaitu Kepastian Hukum, Topografi Wilayah, dan Minimnya Partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, RTRW

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

SUMMARY

Maziyatun Nafiah, 2022, NPM 21801091038, Study Program of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Evaluation of the Spatial Planning Policy of Batu City for 2010-2030 (Study on Batu City), Supervisory Lecturer I: Dr. Nurul Umi Ati, M.AP, Supervisory LecturerII: Suyeno, S.Sos., M.AP

The phenomenon of land conversion for housing construction, tourist attractions, hotels or other developments to support the lives of the people of Batu City continues to experience a significant increase. Apart from this increase, there are still developments that do not pay attention to regional spatial planning. This is known by the occurrence of environmental damage due to the conversion of land for development and the reduction of Batu City's public green open space. Departing from this, it is encouraging to evaluate Batu City government policies based on Batu City Regional Regulation No. 7 of 2011 concerning Batu City Spatial Planning 2010-2030 so that the implementation of spatial planning in Batu City can be more focused as its designation to support the development of Batu City in the future.

This study aims to identify, evaluate and analyze the spatial planning policy of Batu City for 2010-2030 in accordance with its designation, as well as to find out the obstacles faced in spatial planning in Batu City. In order to achieve the research objectives, the researcher used a qualitative research type with a descriptive approach. In the analysis, the researcher uses policy evaluation theory with the CIPP model (context, input, process, and product) by Stufflebeam (2014) regarding evaluation of context, evaluation of input, evaluation of process and evaluation of impact/outcome. The data analysis used in this study are data collection, data condensation, data display, and conclusion as proposed by Miles and Hubberman (2014: 12-14). Researchers used source triagulation and technical triagulation to ensure the validity of the research data.

The results showed that (1) Based on the evaluation stages of context, input, process and product, there were still discrepancies in the implementation of spatial planning policies in Batu City. However, the increase in public green open space has been carried out as directed by the spatial planning policy. (2) several obstacles faced in spatial planning in Batu City, including legal certainty, regional topography, and lack of community participation.

Keywords: Evaluation, Policy, RTRW

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penduduk memiliki peranan penting terhadap pembangunan suatu negara. Tingginya pertumbuhan penduduk serta potensi yang dimiliki setiap wilayah menyebabkan intensifnya pembangunan di berbagai titik. Siagin dalam Digdowiseiso (2019: 7) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu usaha ataupun rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building).*

Pembangunan nasional merupakan bentuk rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi berbagai aspek kehidupan baik masyarakat, bangsa ataupun negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Seiring dengan perkembangan waktu, fenomena alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan, tempat wisata, hotel ataupun pembangunan lain guna menunjang kehidupan masyarakat terus mengalami peningkatan yang siginifikan. Namun, terlepas dari peningkatan tersebut, masih dijumpai pembangunan yang kurang memperhatikan akan tata ruang wilayah sehingga berakibat pada kerusakan lingkungan serta ketidaknyamanan kehidupan

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

masyarakat lainnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dari pola ruang, sedangkan struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat pemukiman. Oleh sebab itu, kondisi yang demikian ini perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana undang-undang penataan ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa penyelengaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, serta bertujuan untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Sebagai bentuk perwujudan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut, setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mewujudkan ruang yang aman dan berkelanjutan, yang selanjutnya akan dilegalisasikan menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda). Melalui Perda RTRW, pelaksanaan pembangunan penataan ruang dapat lebih terarah dan tetap memperhatikan aspek lingkungan termasuk penyediaan serta pemanfaatan ruang terbuka hijau, selain itu juga dapat mendorong pengembangan suatu wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.

Pada prakteknya perencanaan pembangunan tata ruang wilayah di Indonesia masih menjadi salah satu problematika yang cukup kompleks dalam perkembangan suatu kota. Cepatnya perkembangan kota serta tingginya pertumbuhan penduduk mengakibatkan berbagai permasalahan

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

yang berimplikasi pada pembangunan dan penataan ruang pada suatu kota. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hermanto Dardak selaku Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) bahwa terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi bangsa Indonesia kedepannya, mulai dari tingginya jumlah penduduk, kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah, bencana alam yang tinggi, krisis pangan energi, air, dan perubahan iklim (*tataruang.atrbpn.go.id, 2014).* Kondisi yang demikian ini, perlu menjadi prioritas pemerintah dalam hal keberlanjutan kehidupan masyarakat di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga adanya perencanaan tata ruang setiap kabupaten atau kota sangat penting untuk segera diimplementasikansebagaimana dirumuskan pada pedoman atupun payung hukum penataan ruang dan pembangunan daerah.

Kota Batu merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo, serta terdiri atas 19 desa dan 5 kelurahan. Pengembangan wilayah Kota Batu di dukung oleh potensi dan kondisi geografi yang cukup memadai. Berada di ketinggian 800 m diatas permukaan laut dan didominasi dataran tinggi serta perbukitan yang subur, membuat Kota Batu banyak menghasilkan hasil bumi, mulai dari perkebunan, pertanian, bunga hias, hingga holtikultura. Buah Apel menjadi hasil perkebunan andalan, sekaligus sebagai komoditi utama Kota Batu, yang membuat Kota Batu dikenal dengan *tagline* “Kota Apel”.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Sebagai kota penghasil buah Apel, membuat masyarakat Kota Batu bergantung penuh pada komoditi tersebut. Komoditi apel berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat sekitar, serta dapat mendongkrak perkembangan sektor pariwisata melalui pertanian dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Batu yang termuat dalam RPJPD Kota Batu periode 2005-2025 yaitu "Terwujudnya Kota Batu sebagai Sentra Pariwisata berbasis Pertanian yang Berdaya Saing menuju Masyarakat Madani". Melalui visi tersebut menjadikan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kota Batu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi destinasi wisata, penginapan, rumah makan, akomodasi wisata dan lain sebagainya.

Pesatnya perkembangan Kota Batu dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Batu, memicu para investor untuk berlomba-lomba menanamkan sahamnya dalam rangka mendukung Kota Batu menuju arah industri modern yang cukup menjanjikan. Namun, seiring perkembangan waktu, mulai terjadi pergeseran *tagline* Kota Apel menjadi Kota Wisata akibat fenomena alih fungsi lahan untuk tempat pariwisata, perhotelan dan pembangunan lain.

Berjalannya waktu, peningkatan pembangunan di Kota Batu mengakibatkan lahan di Kota Batu semakin menipis.Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan data BPS Kota Batu pada tahun 2020, bahwa terjadi penurunan luas lahan pertanian yang cukup signifikan akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

ataupun bangunan lain. Diketahui pada tahun 2013 luas lahan pertanian masih sekitar 2.373 hektar, kemudian menurun cukup tajam pada tahun 2020 menjadi 1.998 hektar. Kemudian, pada data statistik BPS diketahui telah terjadi kenaikan jumlah bangunan hotel dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2016 masih terdapat 550 hotel sedangkan pada tahun 2021 sudah berjumlah 1.005 hotel. (*https://news.detik.com/kolom/d-5806853/alih-fungsi-lahan-dan-banjir-bandang/amp*, 2021)

Berdasarkan data di atas, ketika alih fungsi lahan terus mengalami peningkatan, maka dapat berdampak terhadap pengaruh sosial ekonomi masyarakat akibat berkurangnya areal pertanian sebagai mata pencaharian utama di wilayah tersebut. Lapangan pekerjaan di sektor pertanianakan semakin minim, produktivitas pertanian ikut terancam, serta keberadaan petani sekaligus hasil pertanian lainnya akan berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakatKota Batu.

Berkurangnya lahan pertanian tersebut, juga berimbas pada berkurangnya lahan apel sebagai komoditi utama Kota Batu.Hal ini sejalan dengan pemaparan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Tani Bangkit Desa Pandanrejo, Kota Batu.

> Dilansir dari situs *jatimtimes.com (2020),* Ketua Gapoktan Tani Bangkit Kota Batu memaparkan, “Saat ini banyak petani yang pindah tanaman jeruk karena salah satu faktor pemeliharaan apel yang semakin mahal, karena harus mengendalikan hamanya dan iklim Kota Batu mengalami perubahan akibat pembangunan yang pesat. Kemudian juga para petani tergiur dengan menjual tanahnya lantaran harganya tinggi dibandingkan bertani sering merugi.”

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Pemaparan ketua Gapoktan Tani Bangkit Desa Pandanrejo tersebut, didukung oleh data Dinas Pertanian Kota Batu bahwa terjadi penyusutan lahan apel setiap tahunnya.

Tabel 1
Luas Lahan Apel di Kota Batu

No	Tahun	Luas Lahan Apel
1.	2015	1.768,27 ha
2.	2016	1.765,57 ha
3.	2017	1.759,69 ha
4.	2018	1.765 ha
5.	2019	1.092,8 ha

Sumber:https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qfvkk01322000, Diolah, 2021.

Terus menurunnya lahan apel dari tahun ke tahun akibat adanya alih fungsi lahan,akan berdampak terhadap ketersediaan buah apel sebagai komoditi utama Kota Batu yang terkenal akan *ikon* apelnya. Dengan berjalannya waktu, *ikon* kota Apel juga akanhilang dengan sendirinya ketika pengendalian alih fungsi lahan tidak dilakukan secara optimal untuk mempertahankan kelestarian buah apel.

Di lain sisi, maraknya alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW Kota Batu, juga terjadi pada Kecamatan Bumiaji. Dimana pada Kecamatan Bumiaji dibangun Hotel The Radja pada tahun 2012 lalu yang akhirnya mendapatkan protes dari warga karena khawatir akan menyebabkan mengeringnya beberapa sumber mata air diwilayah sekitar. (*https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/warga-sumber-mata-air-kota-batu-melawan-pembangunan-hotel-crSi*, 2021).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Pembangunan Hotel The Radja diketahui telah bertentangan dengan fungsi BWK 3 yang ditetapkan di Kecamatan Bumiaji dengan fungsi utama pengembangan agropolitan, pengembangan kawasan wisata alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata.

Ketika masyarakat ataupun swasta masih terus melakukan pembangunan, tanpa menyesuaikan RTRW Kota Batu maka akan berdampak terhadap ketidaksesuaian penataan ruang di Kota Batu, sehingga pembangunan dilakukan dimanapun sebagaimana kehendak mereka, sehingga ketika hal tersebut tidak segera dikendalikan maka berakibat pada berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Batu.

Berdasarkan hasil riset Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, RTH Kota Batu saat ini berada pada kisaran 12-15% dari standar minimal RTH yang harus dimiliki yaitu 20% dari luas wilayah. Minimnya RTH Kota Batu serta rusaknya resapan air hujan di hulu juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di desa Tulungrejo, Bulukerto, dan wilayah Bumiaji Kota Batu pada tanggal 4 November 2021.(*https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/06/11/2021/alih-fungsi-lahan-dan-minimnya-rth-jadi-penyebab-banjir-di-batu/, 2021).*

Seiring dengan terjadinya kerusakan lingkungan akibat adanya alih fungsi lahan untuk pembangunan, dalam hal ini perlu dilakukannya penilaian lebih lanjut dalam pelaksanaan penataan ruang yang ada di Kota Batu di karenakan meningkatnya pembangunan yang tidak ramah lingkungan.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, hakikatnya permasalahan terkait alih fungsi lahan untuk pembangunan dalam menunjang kegiatan masyarakat serta perkembangan Kota Batu yang kemudian berdampak terhadap berkurangnya RTH di Kota Batu, sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu melalui Perda Kota Batu nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030. Namun, dalam implementasinya masih belum sesuai sebagaimana dengan RTRW Kota Batu tersebut.

Perkembangan kota yang semakin maju dengan didukung pesatnya pembangunan serta dampak lingkungan yang ditimbulkan, menjadi sumber pokok dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mengimplementasikan kebijakan tata ruang di Kota Batu. Keberhasilan implementasi kebijakan yang demikian ini, sangat ditentukan oleh keterkaitan kepentingan baik dari masyarakat, swasta, ataupun pemerintah daerah. Ketiga unsur tersebut memerlukan persamaan pandangan dan persepsi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dikarenakan intensifnya pembangunan penunjang wisata akan merubah Kota Batu sebagai Kota Pariwisata yang mendunia. Namun Pemerintah Kota Batu perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Perhatian tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan sektor pariwisata dan pertanian, tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial ekonomi agar perkembangan Kota Batu tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasikan dengan baik.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Dengan demikian perlu dilakukannya evaluasi mengenai kebijakan pemerintah Kota Batu yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu nomor 7 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 agar penataan ruang di Kota Batu dapat lebih terarah sesuai dengan peruntukannya guna perkembangan Kota Batu yang lebih Baik. Hal ini sejalan dengan definisi evaluasi yang disampaikan Anderson dalam Kawengian & Rares (2015:4) bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan adalah "*the appraisal or assesment of policy, including its content implementation and impact",* yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut penilaian atau menguji sebuah kebijakan termasuk substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Melalui adanya penilaian ini, diharapkan dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat kepentingan pembangunan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, dan dikawatirkan dalam beberapa tahun ke depan mengakibatkan lebih banyak kerusakan lingkungan sehingga kehidupan masyarakat tidak akan bisa ditopang oleh sektor pertanian ataupun sektor pariwisata akibat adanya kerusakan lingkungan.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan evaluasi kebijakan RTRW adanya evaluasi ini dapat tercapai dengan baik. Dalam hal ini tujuan evaluasi RTRW Kota Batu adanya untuk mengevaluasi dalam implementasi kebijakan RTRW Kota Batu yang belum sesuai dengan peruntukannya baik dari level konteks, masukan, saat implementasi kebijakan hingga hasil serta dampak yang terjadi, sebagaimana model evaluasi menurut Stufflebeam

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

(2014:312)yang memaparkan bahwa "*The CIPP model's core concepts are evaluations of an entity's context, inputs, processes, and products"*. CIPP merupakan bentuk evaluasi terhadap konteks, evaluasi terhadap masukan (*input),* terhadap proses dan terhadap hasil (*product)* dari sebuah kebijakan. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai "**Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030**".

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 sesuai dengan peruntukannya ?
2. Apa saja kendala-kendala dalam penataan ruang di Kota Batu?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sebagai pusat perhatian untuk membatasi suatu permasalahan yang akan diteliti agar pembahasan yang dikaji tidak terlalu luas. Menurut Moleong (2016: 152), memaparkan bahwa dalam penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, yang dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif fakta masuk-keluar suatu informasi yang baru saja diperoleh di lapangan.

Dalam Rangka membatasi pembahasan yang terlalu luas, serta memperoleh gambaran seksama mengenai materi penelitian, maka ruang

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

lingkup pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 yang sesuai dengan peruntukannya
   a. Gambaran Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030
   b. Evaluasi kebijakan RTRW Kota Batu tahun 2010-2030 menggunakan Model CIPP

      Evaluasi Kebijakan RTRW Kota Batu Tahun 2010-2030 menggunakan model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam (2014). Model CIPP dipilih dalam penelitian ini dikarenakan model ini memungkinkan untuk dilaksanakannya evaluasi secara menyeluruh, meliputi berbagai komponen yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana fokus dalam penelitian ini yaitu akibat adanya alih fungsi kawasan. Beberapa komponen evaluasi model CIPP yang digunakan yaitu :

      a) *Context evaluation* (Evaluasi terhadap konteks)
      b) *Input evaluation* (Evaluasi terhadap masukan)
      c) *Process evaluation* (Evaluasi terhadap proses)
      d) *Product evaluation* (Evaluasi terhadap hasil /dampak)
2. Kendala-kendala dalam penataan ruang di Kota Batu
   a. Kepastian Hukum dan Topografi Wilayah
   b. Minimnya Partisipasi masyarakat

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
   a. Mengetahui gambaran umum Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030
   b. Mengetahui, mengevaluasi serta menganalisis Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030 sesuai dengan peruntukannya.
   c. Mengetahui kendala-kendala dalam penataan ruang di Kota Batu
2. Tujuan Subjektif
   a. Untuk memberikan pemahaman serta wawasan bagi penulis, terhadap penerapan teori dibangku perkuliahan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
   b. Untuk membantu mendapatkan kelengkapan data penelitian sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis:

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai evaluasi kebijakan RTRW Kota Batu

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

terhadap peruntukannya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembaca dan pengembangan penelitian serupa.

c. Penelitian ini diharapkan agar peneliti juga dapat lebih memahami teori- teori yang dipelajari selama di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiranbagi Pemerintah Kota Batu dalam penataan ruang di Kota Batu.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dan juga masyarakat Kota Batu mengenai kebijakan penataan ruang di Kota Batu dengan tetap mengutamakan aspek lingkungan demi keberlangsungan pengembangan Kota Batu dan kesejahteraan masyarakatnya.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diketahui melalui tahap evaluasi CIPP (*context*, *input*, *process*, *product*) sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan di atasbahwa penerapan kebijakan penataan ruang di Kota Batu masih terdapat ketidaksesuaikan sebagaimana arahan penataan ruang yang ada di dalam Perda nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030, hal ini dapat diketahui sebagai berikut

a. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya serta pesatnya perkembangan Kota Batu mendorong masyarakat dalam penggunaan lahan di hutan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, pertanian, pemukiman hingga kegiatan ekonomi masyarakat lainnya.
b. Pada proses input, keterlibatan *stakeholder* baik masyarakat, pemerintah, dan swasta dalam perencanaan hingga implementasi kebijakan penataan ruang masih belum optimal. Dimana pemerintah Kota Batu belum melakukan penindakan secara tegas dikarenakan belum adanya pedoman yang kuat untuk melakukan penindakan.
c. Berdasarkan kesesuaian rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan Budidaya dengan kondisi sebenarnya, sampai dengan bulan Desember tahun 2021 penataan RTRW di Kota Batu masih berada pada tahap

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

identifikasi lahan eksisting, sehingga luasan lahan yang belum mengalami kesesuaian sebagaimana rencana tata ruang wilayah

d. Dampak positif implementasi penataan ruang di Kota Batu hingga saat ini adalah peningkatnya perkembangan Kota Batu sebagai Kota Pariwisata dan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kota Batu . Namun dampak negatif yang terjadi yaitu implementasi penataan ruang di Kota Batu belum sepenuhnya memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan sehingga menjadi salah satu pemicu kegiatan alih fungsi lahan dan berakibat pada terjadinya banjir.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan permasalahan implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Batu terutama pengendalian alih fungsi lahan di Kota Batu, maka dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Wilayah Kota Batu yang berada di wilayah perbukitan mendorong dilakukannya perencaaan penataan ruang seideal mungkin dengan kondisi wilayah. Selain itu, diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar dapat memberikan pengarahan rencana penataan ruang secara rinci dan detail guna mencapai tujuan penataan ruang serta keseimbangan lingkungan di Kota Batu.
2. Dalam implementasi perda RTRW perlu memperhatikan sinergitas antar *stakeholder* yang terlibat untuk mencapai tujuan penataan ruang serta menjaga keseimbangan lingkungan Kota Batu, mengingat masih lemahnya peran masyarakat di dalam penataan ruang di Kota Batu. Maka diperlukan

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat terkait kebijakan penataan ruang terutama yang berkaitan dengan alih fungsi lahan di Kota Batu. Sosialisasi dalam hal ini dapat dilakukan melalui media cetak, media sosial maupun sosialisasi secara langsung. Dimana sosialisasi pada media sosial ini dapat dilakukan melalui postingan di akun media sosial dinas-dinas yang ada di Kota Batu, terutama yang berkaitan erat dengan penataan ruang di Kota Batu. Selain itu, sosialisasi juga dapat dilakukan melalui pesan *forward Short Message Service* (SMS) maupun aplikasi *chat* lainnya yang banyak digunakan oleh masyarakat guna mencapai tujuan dalam pentaan ruang di Kota Batu.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alamsyah, Kamal. 2016. *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.

Digdowiseiso, Kumba. 2019. *Teori Pembangunan.* Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

Dunn, William, N. 2003 (1994).*Public Policy Analysis: An Introduction New Jersey:Pearsons Education. Edisi Bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul pengantar Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif.* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP)

Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data AnalysisAMethods SourcebookEdition* ,United Stated Of Amerika:Sage Publication.

Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif.*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.* Yogyakarta: Leutikaprio.

Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.*Surakarta; Cakra Books.

Setiadi, Hafid. 2008. *Modul Perencanaan*. http://repository.ut.ac.id/4330/2/PWKL4308-M1.pdf

Stufflebeam, D.L., Coryn, Chris L. S. (2014). *Evaluation; Theory, Model, & Application (Second Edition).*San, Fransisco: Jossey-Bass.

Subianto. 2020. *Kebijakan Publik.* Surabaya: Brilliant.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.CV

Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*.Jakarta :PT Bumi Aksara.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan:Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruangi*. Jakarta: Prenada Media Goup

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.*

Jurnal

Darmawati, Choirul. S, Imam, H. 2015. *Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan*.Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Vol. 4, No, 2.https://media.neliti.com/media/publications/42457-ID-implementasi-kebijakan-rencana-tata-ruang-wilayah-rtrw-dalam-perspektif-pembangu.pdf

Imronah.2020. *Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. http://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf

Kawengian, Debby D.V dan Joyce Jacinta Rares.2015.*Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara*.Jurnal Acta Diurna.Vol 4, No 5. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/9879

Makodangan,Rohaya Putri dkk. 2019. *Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamabogu Tahun 2014-2034*. Jurnal Spasial Vol.6, No. 1.https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/22821

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Putra, Randa Nurianansyah. 2015. *Implementasi Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan.*Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 3, No. 2. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmpf91be666c4full.pdf

Rasminto dan Kausar.2018.*Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Pertanian di Kabupaten Bekasi.*Jurnal Genta Mulia, Vol.9 No.1, hlm.8-22.https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm/article/view/140

Suyeno dan Sekarsari, Retno Wulan. 2018. *Analisis Kebijakan Pengaturan Tata Ruang (Studi Tentang Analisis RTRW di Kota Malang)*. Jurnal ketahanan pangan, Vol. 2 No.1. https://www.neliti.com/id/publications/269672/analisis-kebijakan-pengaturan-tata-ruang-studi-tentang-analisis-rtrw-di-kota-mal

Dasar hukum/ Undang-undang

Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu Tahun 2010-2030

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Dokumen

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Batu

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2018

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Lingkungan Hidup Kota Batu Tahun 2020

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2018-2022

Internet

http://ngalam.id/read/1158/geografi-kota-batu/

https://infopublik.id/kategori/nusantara/608818/petani-sayur-lereng-arjuna-beralih-tanam-pohon-buah?show=

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

https://news.detik.com/kolom/d-5806853/alih-fungsi-lahan-dan-banjir-bandang/amp

https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/kota-batu/06/11/2021/alih-fungsi-lahan-dan-minimnya-rth-jadi-penyebab-banjir-di-batu/

https://suryamalang.tribunnews.com/2021/06/01/rtrw-kota-batu-akan-direvisi-ini-alasannya?page=2

https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/warga-sumber-mata-air-kota-batu-melawan-pembangunan-hotel-crSi

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qfvkk01322000

https://www.republika.co.id/berita/r2527h349/alih-fungsi-hutan-lindung-diduga-penyebab-banjir-kota-batu

ppid.batukota.go.id,

University of Islam Malang REPOSITORY

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id